

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kampanye politik ke ruang digital yang berlangsung cepat, masif, dan sulit dikendalikan. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan pemilu, terutama terkait penyebaran disinformasi dan pelanggaran kampanye di media sosial. Dalam konteks tersebut, pengawasan kampanye digital tidak hanya menjadi persoalan teknis, tetapi juga persoalan kelembagaan dalam sistem politik elektoral.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya dalam pengawasan kampanye digital pada Pemilu 2024 dengan menggunakan teori peran Henry Mintzberg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Bawaslu, pengurus partai politik, pengamat pemilu, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan laporan pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menjalankan peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan dalam batas kewenangan kelembagaan yang dimilikinya. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena keterbatasan mandat hukum, desain regulasi pengawasan kampanye digital, serta mekanisme birokrasi penanganan pelanggaran yang bersifat berjenjang. Kondisi ini menyebabkan banyak pelanggaran kampanye digital tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal meskipun substansi pelanggarannya jelas.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbatasan pengawasan kampanye digital bukan semata disebabkan oleh kinerja aktor, tetapi merupakan konsekuensi dari desain institusional pengawasan pemilu yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika politik digital. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Bawaslu dalam sistem demokrasi elektoral di era digital.

**Kata kunci: Bawaslu, kampanye digital, pengawasan**

## ABSTRACT

*The development of information technology has transformed political campaigns into the digital sphere, making them faster, more massive, and more difficult to control. This transformation creates new challenges for electoral supervision, particularly related to the spread of disinformation and digital campaign violations on social media. In this context, digital campaign supervision is not merely a technical issue but also an institutional issue within the electoral political system.*

*This study aims to describe the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Tasikmalaya City in supervising digital campaigns during the 2024 General Election by applying Henry Mintzberg's role theory. This research employs a qualitative method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with Bawaslu officials, political party representatives, election observers, and document analysis of electoral regulations and supervisory reports.*

*The findings show that Bawaslu has carried out interpersonal, informational, and decision-making roles within the limits of its institutional authority. However, these roles have not been performed optimally due to limited legal mandates, regulatory design, and bureaucratic procedures in handling digital campaign violations. As a result, many digital campaign violations could not be effectively followed up, despite the clarity of their substantive violations.*

*This study concludes that the limitations of digital campaign supervision are not solely caused by actor performance, but are largely a consequence of the existing institutional design of electoral supervision, which has not fully adapted to the dynamics of digital politics. These findings highlight the importance of strengthening the institutional capacity of Bawaslu within Indonesia's electoral democracy in the digital era*

**Keywords: Bawaslu, digital campaign, supervision**